



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

260/
24-07-09

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 366/MENKES/SK/V/2009
TENTANG
ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah secara nyata di di Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu adanya dukungan dana pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dalam penyeleenggaraan program pembangunan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Alokasi Anggaran Dana Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bagi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan dengan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
8. Peraturan Pemerinta Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006.
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1161/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**
- Kedua :** Alokasi dana Dekonsentrasi di Provinsi dimaksud Diktum Kesatu adalah untuk:
1. Program Lingkungan Sehat;
 2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 3. Program Upaya Kesehatan Perorangan;
 4. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 6. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
 8. Program Sumber Daya Kesehatan;
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;
- Ketiga :** Alokasi dana Tugas Pembantuan di Provinsi dimaksud Diktum Kesatu adalah untuk:
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 3. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;
- Keempat :** Alokasi dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota adalah untuk:
1. Program Lingkungan Sehat;
 2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 3. Program Upaya Kesehatan Perorangan;
- Kelima :** Ruang lingkup kegiatan untuk masing-masing program dimaksud Diktum Kedua, Diktum Ketiga dan Diktum Keempat sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam** : Rincian alokasi dana masing-masing program dimaksud Diktum Kedua, Diktum Ketiga dan Diktum Keempat untuk setiap Satuan Kerja tercantum dalam **Lampiran II** Keputusan ini,
- Ketujuh** **Pembiayaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 024 – Kementerian, Departemen Kesehatan Tahun 2009.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di **JAKARTA**
pada tanggal 13 Mei 2009

MENTERI KESEHATAN,



Dr. Siti FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
7. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
8. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan dilingkungan Departemen Kesehatan
9. Para Kepala Biro/Kepala Pusat dilingkungan Departemen Kesehatan
10. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
11. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia
12. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 366/MENKES/SK/V/2009
TANGGAL : 13 MEI 2009

RUANG LINGKUP KEGIATAN
MASING-MASING PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

I. Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman **Rp. 113.119.744.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman di daerah tahun 2009 disediakan dana sebesar Rp. 113.119.744.000,- yang terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp 39.784.104.000,- dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 73.415.640.000,-.

Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 39.784.104.000,- pada Lampiran II.a. dialokasikan kepada 14 Provinsi yang melaksanakan Proyek Pamsimas dan 8 Provinsi yang melaksanakan Proyek WSLIC-II, dengan tujuan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai sanitasi total berbasis masyarakat di 10.000 desa sampai tahun 2013,

Sedangkan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 73.415.640.000,- pada Lampiran II.b. dialokasikan kepada 27 Kabupaten di 6 Provinsi lokasi proyek CWSH dalam rangka Penyediaan Sarana Air Bersih di Pedesaan serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai sanitasi total berbasis masyarakat.

II. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan **Rp. 15.094.305.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan di daerah pada tahun 2009 disediakan dana dekonsentrasi sebesar Rp. 15.094.305.000,- pada Lampiran II.a. Dana dekonsentrasi tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan 1) Rapat koordinasi perencanaan kebutuhan obat tingkat provinsi, 2) Monitoring ketersediaan obat di Provinsi/Kab/Kota serta sampling alat kesehatan dan monitoring iklan alat kesehatan dan yang beredar di masyarakat, dan 3) Biaya operasional instalasi farmasi daerah. Sedangkan menu tambahan yang disepakati adalah untuk 1) Sosialisasi software dinamika obat di PBF dan software narkotika dan psikotropika (SIPNAP), 2) Peningkatan kemampuan tenaga kefarmasian dalam Pelayanan Informasi Obat (PIO) di Rumah Sakit Umum Pemerintah, 3) Penggerakan penggunaan obat yang rasional (POR) di provinsi dan kabupaten/kota, 4) Pelatihan software SAI dan Simak BMN bagi tenaga pengelola di Provinsi.

Apabila kegiatan pada menu wajib telah didanai APBD, daerah baru dapat memilih menu tambahan.

Pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan dilaporkan tiap bulan kepada Sekretaris Ditjen Binfar dan Alkes.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. Program Upaya Kesehatan Perorangan

Rp. 885.629.317.000,-

Untuk penyelenggaraan Program Upaya Kesehatan Perorangan di daerah tahun 2009 disediakan dana sebesar Rp. 885.629.317.000,- yang dialokasikan melalui dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada Lampiran II.a dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 883.629.317.000,- pada Lampiran II.b.

Dana dekonsentrasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- diarahkan untuk mendukung koordinasi manajemen penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) antara Pusat dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat daerah yang mendapat dana Tugas Pembantuan.

Dalam rangka koordinasi manajemen penyelenggaraan UKP, maka kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Pertemuan konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran UKP antara Ditjen Bina Pelayanan Medik dengan Dinas Kesehatan Provinsi.
Hasil yang diharapkan : Mendapatkan rumusan kebijakan dan rancangan kebutuhan anggaran dalam rangka penyelenggaraan program UKP.
Pelaksanaan : Dilaksanakan 2 (dua) kali untuk menyusun usulan kebutuhan anggaran tahun yang akan datang (2010) dan menyusun kegiatan sesuai alokasi Satuan 3.
Stakeholder yang terlibat :
 - a) Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
 - b) Nara sumber terkait
 - c) Dinas Kesehatan Provinsi
- 2) Pertemuan konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran UKP Dinas Kesehatan Provinsi dengan Rumah Sakit Kab/Kota dan Labkes di daerah binaannya.
Hasil yang diharapkan :
 - a) Mendapatkan rumusan kebijakan dan rancangan kebutuhan anggaran dalam rangka penyelenggaraan program UKP.
 - b) Pemetaan jejaring sarana kesehatan dan prioritas pembangunan/ pengembangan RS/ Labkes daerah.*Pelaksanaan :* Dilaksanakan 1 (satu) kali pertemuan untuk mendukung pertemuan/konsolidasi perencanaan dengan Pusat.
Stakeholder yang terlibat:
 - a) Dinas Kesehatan Provinsi
 - b) Rumah Sakit dan Labkesda
 - c) Nara Sumber terkait
 - d) Pemerintah Daerah setempat
- 3) Pertemuan Konsolidasi Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Program UKP antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Rumah Sakit dan Labkesda yang menerima APBN.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Hasil yang diharapkan : Mendapatkan laporan keuangan dan realisasi kegiatan serta penyerapan anggaran hasil penyelenggaraan program UKP (form A) sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2006 yang ditindaklanjuti dengan Kepmenkes No. 656/Menkes/SK/VI/2007.

Stakeholder yang terlibat:

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Rumah Sakit dan labkes daerah
- c) Pemerintah Daerah setempat

- 4) Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepada Rumah Sakit Kab/Kota dan Labkes daerah di wilayah kerjanya melalui dana yang sudah tersedia.

Hasil yang diharapkan : Dapat diketahui hasil pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta mengidentifikasi hambatan dan kendala yang terjadi di lapangan sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan selanjutnya.

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Pertemuan berkala
- b) Kunjungan lapangan
- c) Pemantauan/Bimbingan Teknis (Bimtek)/pengendalian program

- 5) Dana Dekonsentrasi tahun 2009 pada Satker Dinas Kesehatan Provinsi dapat dipergunakan untuk biaya supervisi, Bimtek dan lain-lain sesuai dengan kegiatan yang ada pembayaran kekurangan pagu (pagu minus) tahun 2007 yang belum teralokasi pada tahun 2008.

Hasil yang diharapkan : Dapat menutupi kekurangan dana Dekonsentrasi yang terdapat pada Satker Dinas Kesehatan tahun 2007 sesuai dengan hasil audit aparat pengawas.

Pemanfaatan dana APBN yang didaerahkan di Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan Daerah melalui dana Tugas Pembantuan dipergunakan untuk mencapai 5 (lima) sasaran Program Upaya Kesehatan Perorangan yaitu :

- a) Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin melalui pembiayaan oleh pemerintah di kelas III RS sebesar 100 %.
- b) Presentase RS yang melaksanakan pelayanan Gawat Darurat mencakup 90 %.
- c) Jumlah RS yang melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) mencakup 75 %.
- d) Jumlah RS yang terakreditasi mencakup 75 %.
- e) Berkembangnya RS Pendidikan sebagai tempat Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PDSBK) sebesar 50 %.

Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 883.629.317.000,- diarahkan untuk :

- a) Pengembangan RS Kab/Kota sebagai rujukan *safe community*,
- b) Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui peningkatan PONEK di RS Kabupaten/Kota serta RS Sayang Ibu dan Sayang Bayi (RSSI/SB).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c) Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit/Labkesda yang memadai dan merata khususnya di daerah Kabupaten/Kota pemekaran, kepulauan, perbatasan, terpencil, dan tertinggal antara lain pengembangan pelayanan medik mobilitas berbasis Rumah Sakit.
- d) Penerapan akreditasi dan *Patient Safety Assurance* di RS dan Labkesda.
- e) Peningkatan kualitas pelayanan medik melalui pengembangan standar pelayanan kedokteran, kesehatan jiwa, keperawatan dan penunjang medik lainnya serta penapisan kedokteran komplementer dan alternatif di RS.
- f) Peningkatan RS menjadi pusat-pusat pelayanan unggulan.
- g) Pengadaan Peralatan Non Medik dapat dipergunakan untuk Pengadaan meubelair dan sarana gedung (seperti : lift, AC, nurse call, dll) hanya untuk kelengkapan gedung baru. Sedangkan penggantian dan perbaikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

**HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERENCANAAN
KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN :**

- 1. Usulan yang diterima di Pusat, harus didukung dengan :
 - a) Usulan RS/Labkesda ditandatangani oleh Direktur dan diketahui oleh Bupati/Walikota setempat.
 - b) Usulan pengadaan peralatan harus didukung dengan RAB dan spesifikasi serta harga dengan 3 pembanding yang ditandatangani oleh KPA dan diketahui Bupati/ Walikota setempat, serta dilampirkan sumber datanya (brosur, internet, dll).
 - c) Usulan pembangunan gedung dengan melampirkan master plan, gambar/blok plan, unit cost (per M2) dan RAB. Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Kanwil Pekerjaan Umum (PU)/Kimpraswil Pemda setempat.
 - d) Usulan yang tidak dilengkapi dengan data-data pendukung di atas sampai batas waktu penetapan alokasi definitif, tidak dapat disetujui (kegiatan diblokir/ditunda).
 - e) Membuat surat Pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Direktur dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
- 2. Pembangunan RS Baru
 - a) Lahan harus telah siap bangun (pembebasan, sertifikat tanah, pemerataan dan pemadatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah).
 - b) Dilengkapi studi kelayakan dan master plan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- 3. Pembangunan Gedung
 - a) Pembangunan hanya untuk gedung pelayanan (seperti gedung poliklinik/ rawat jalan, gedung rawat inap, gedung UGD, gedung ICU, dll).
 - b) Dana APBN yang didaerahkan untuk RS tidak diperbolehkan untuk gedung kantor, gedung asrama, rumah dokter, rumah direktur, garasi, workshop, aula, masjid, jalan lingkungan/ kompleks, parkir, pagar atau taman.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c) Melanjutkan pembangunan yang sudah ada dan belum terselesaikan (dana Pembangunan melalui sumber dana yang sama)

IV. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 66.039.216.000,-

Dalam penyelenggaraan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di daerah tahun 2009 disediakan dana dekonsentrasi sebesar Rp. 66.039.216.000,- pada Lampiran II.a. Penggunaan dana dekonsentrasi diutamakan adalah untuk 1) Penggerakan dan pengorganisasian masyarakat dalam pembentukan Desa Siaga dan 2) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta 3) penyediaan anggaran untuk pengelolaan kegiatan, penyusunan laporan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan pada tahun 2009, meliputi:

- 1) Pengembangan Desa Siaga; yang dilaksanakan dengan:
 - a. Pelatihan Kader dan Tokoh Masyarakat (*Recruitmen Kader/Tokoh Masyarakat*) yang terdiri:
 - (1) Peserta = 2 (dua) orang kader
= 1 (satu) orang Toma
 - (2) Fasilitator = Puskesmas
 - (3) Supervisor = Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota
 - (4) Tempat Pelaksanaan = Kecamatan (Puskesmas)
 - b. Penggerakan dan Pengorganisasian Masyarakat yang meliputi:
 - (1) Pembentukan Forum
 - (2) Survey Mawas Diri (*Community Self Survey*); (pelaksanaan survey dan pengolahan dan analisa data);
 - (3) Musyawarah Masyarakat Desa; (penentuan prioritas masalah, penyusunan rencana aksi desa siaga dan pelaksanaan rencana aksi);
 - c. Monitoring dan Pembinaan Pengembangan Desa Siaga; (ke desa oleh petugas puskesmas, ke puskesmas oleh petugas kabupaten/kota dan ke kabupaten/kota oleh petugas provinsi),
- 2) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - a. Pengembangan materi dan kebijakan
 - b. Pengembangan Pesan dan Media
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi
 - d. Penguatan dan pengembangan jejaring.

V. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 388.315.385.000,-

Dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi/Balita melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan di daerah tahun 2009 disediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 345.565.385.000,- dan dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp. 42.750.000.000,- pada Lampiran II.a



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dana tersebut disediakan untuk:

A. Pelayanan Kesehatan Ibu dengan kegiatan utama :

- 1). P4K dgn stiker di seluruh Puskesmas;
- 2). Kemitraan Bidan-Dukun,
- 3). Pelatihan PONED;
- 4). Pelayanan KB berkualitas, dan
- 5). Pembinaan/Monev

B. Pelayanan Kesehatan Anak, dengan kegiatan utama

- 1). Pelatihan MTBS,
- 2). Penggerakan Masyarakat melalui Buku KIA,
- 3). Pertemuan Lintas Program /Lintas Sektor,
- 4). Pembinaan/Monev

C. Pelayanan Kesehatan Dasar dengan kegiatan utama

- 1). Pelatihan Manajemen Puskesmas,
- 2). Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Poskestren, Posyandu, dll),
- 3). Pembentukan/Pengembangan Poskesdes,
- 4). Peningkatan Pelayanan DTPK dan
- 5). Pembinaan/Monev

D. Pelayanan Kesehatan Kerja dengan kegiatan utamanya

- 1). Pendataan untuk data dasar kesehatan kerja;
- 2). Peningkatan kapasitas petugas kesehatan kerja;
- 3). Peningkatan pelayanan kesehatan kerja;
- 4). Pemberdayaan kesehatan pekerja; pengembangan balai kesehatan kerja masyarakat
- 5). Pembinaan/Monev

Dalam Program UKM juga dialokasikan **dana Tugas Pembantuan (TP)** sebesar Rp. 33.750.000.000,- yang dialokasikan untuk 5. (lima) provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah, yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan penyediaan alat kesehatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Program UKM di Provinsi tersebut.

Sedangkan program UKM yang dibiayai oleh Project DHS 2-ADB yang terdapat di 9 (sembilan) provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan dengan total dana Rp. 96.621.522.000 terdiri dari RM sebesar Rp.854.599.000, RMP sebesar Rp. 26.092.338.000,- dan RK/PHLN sebesar Rp.69.674.585.000,-.

Kegiatan utama terdiri dari :

- 1). Pelatihan APN/PONED;
- 2). Pengembangan Desa Siaga
- 3). Pemberian Bea siswa
- 4). Pembinaan/Monev



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Disamping itu dialokasikan dana dekonsentrai untuk pelaksanaan Project SPH/HSSP dengan total dana sebesar Rp. 2.743.863,- (RMP) di 2 Propinsi yaitu NTT dan NTB

Kegiatan utama terdiri dari :

- 1). Pelatihan Computer Based Inventory System (CBIS)
- 2). Pelatihan Physycal Asset Management
- 3) Pembinaan/Monev

VI. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rp. 48.410.200.000,-

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit di daerah tahun 2009 disediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 10.025.100.000,- yang prioritas penggunaannya adalah untuk penyelenggaraan SKD KLB dan investigasi KLB.

Disamping itu juga dialokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 38.385.000.000,- diberikan kepada beberapa provinsi/kabupaten sebagai dana stimulus untuk kegiatan pasca bencana dan pencegahan dan pemberantasan khususnya flu burung. Alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara rinci menurut Satuan Kerja pada Lampiran II.a.

VII. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 183.565.892.000,-

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di daerah pada tahun 2009 disediakan dana dekonsentrasi sebesar Rp. 183.565.892.000,- yang terdiri dari dana Rupiah Murni sebesar Rp.40.842.947.000,-, dana Rupiah Murni Pendamping Rp.45.506.080.000,- dan dana Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 97.216.865.000,- untuk Proyek NICE Project ADB Loan No. 2348-INO (SF), pada Lampiran II.a.

Dana Rupiah Murni tersebut dialokasikan pada 33 propinsi sedangkan dana Rupiah Murni Pendamping dan dana Pinjaman Luar Negeri dialokasikan pada 6 propinsi.

Dana dekonsentrasi Rupiah Murni tersebut digunakan untuk kegiatan:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran (Renja-KL, RKA-KL, SRAA dan DIPA);
2. Pengolahan data program gizi;
3. Penanggulangan kurang vitamin A (KVA);
4. Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) ;
5. Penanggulangan anemia gizi besi ;
6. Penanggulangan kurang energi protein (KEP) ;
7. Pemantauan status gizi balita ;
8. Pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu ;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Penyebarluasan informasi kesehatan dan gizi menuju keluarga sadar gizi (Kadarzi);
10. Peningkatan penggunaan air susu ibu (ASI) dan
11. Monitoring dan evaluasi program perbaikan gizi.

Dalam Perbaikan Gizi Masyarakat yang dibiayai oleh Proyek NICE Project ADB Loan No. 2348-INO (SF) pada 6 Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, NTT dan NTB) pada tahun anggaran 2009 dialokasikan dana melalui dekosentrasi sebanyak Rp. 142.722.945.000,- yang terdiri dari Rp. 97.216.865.000,- berupa RK dan Rp. 45.506.080.000,- berupa rupiah murni pendamping (RMP). Dana tersebut digunakan untuk membiayai Paket Gizi Masyarakat dan kegiatan pendukungnya, honorarium dan operasional tenaga pendamping fasilitator, honorarium PPCU (Province Project Coordination Unit), dan DPIU (district Project Implementation Unit). Kegiatan pendukung Paket Kegiatan Gizi Masyarakat dapat berupa pelatihan dan pembinaan Kelompok Gizi Masyarakat, Pelatihan Fasilitator Masyarakat, dan Review Paket Gizi Masyarakat.

Disamping itu juga disediakan biaya penyebarluasan informasi tentang NICE dan Gizi, pelatihan-pelatihan gizi, penyusunan anggaran dan review kegiatan NICE, pengadaan peralatan pelayanan gizi untuk Puskesmas, kendaraan roda 2 untuk operasional tenaga gizi Puskesmas dan pengadaan kendaraan operasional roda 4 untuk DPIU dan PPCU.

VIII. Program Sumber Daya Kesehatan

Rp. 41.000.079.000,-

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Sumber Daya Kesehatan di daerah pada tahun 2009 disediakan dana dekonsentrasi sebesar Rp. 41.000.079.000,- pada Lampiran II.a.

Dana dekonsentrasi tersebut digunakan untuk membiayai 1) Pendidikan dan pelatihan teknis untuk bidan/fasilitator untuk pengembangan desa siaga, petugas pemeriksa kesehatan jemaah calon haji tahap I dan II serta Poskestren, 2) Penyusunan profil Sumber Daya Kesehatan yang meliputi kegiatan administrasi, persiapan, pemutakhiran data, pengolahan data, pengumpulan data dan supervisi serta finalisasi, 3) Bantuan beasiswa untuk lanjutan dan baru, serta 4) Administrasi kegiatan.

Tujuan kegiatan tersebut di atas adalah untuk 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan program dalam menunjang komitmen global (Millenium Development Goals (MDGs), prioritas nasional dan program spesifik di daerah, 2) Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM Kesehatan di Puskesmas, RS, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/ Kota, 3) Terselenggaranya tugas belajar bagi PNS Daerah, 4) Terlatihnya diklat teknis fungsional dan manajemen kesehatan.

IX. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Rp. 256.749.248.000,-

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan di daerah pada tahun 2009 disediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 126,749,248.000,- dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 130.000.000,- pada Lampiran II.a.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dana dekonsentrasi sebesar Rp. 126,749,248.000,- tersebut digunakan untuk kegiatan 1) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran (Renja-KL bahan Musrenbang, RKA-KL dan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan), 2) Pengelolaan data dan informasi kesehatan (Jaringan SIKNAS On-line provinsi/kabupaten/kota SIK, Kepegawaian [Data PTT, Pegawai Pusat dan Kebutuhan Pegawai], SIRS, SIMPUS dan SST termasuk pengadaan alat pengolah data) serta yang belum ada jaringannya On-line, 3) Percepatan pembayaran gaji dan insentif tenaga PTT pusat, 4) Penyusunan laporan eksekutif, penyusunan laporan keuangan (Neraca, LAK, CALK), penyusunan evaluasi kinerja (PP No. 39 Th. 2006), penyusunan profil kesehatan (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan penyusunan alokasi dan proporsi anggaran APBD untuk kesehatan {preventif, promotif dan kuratif}, 5) melakukan advokasi dalam rangka terwujudnya komitmen daerah dalam memunjang pembangunan kesehatan dan jaminan kesehatan bersumber APBD serta 6) Penyebaran informasi/publikasi hasil pembangunan kesehatan kepada masyarakat.

Kegiatan-kegiatan tersebut yang dalam pelaksanaannya dapat berbentuk pertemuan, konsinyasi, sosialisasi, monitoring, bimbingan teknis, konsultasi, pencetakan profil, administrasi dan operasional termasuk honor sesuai dengan keperluan yang berlaku.

Di samping itu, dalam Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan juga disediakan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 130.000.000,- yang dialokasikan kepada provinsi tertentu sebagai dana akselerasi untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik yang kepemilikan oleh pemerintah maupun swasta yang bersifat komprehensif maupun simultan.



MENTERI KESEHATAN,

FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN B A
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 368/MEN/KE/SK/V/2009
TANGGAL : 13 MEI 2009

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TINGKAT PROVINSI *)
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
TAHUN ANGGARAN 2009

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					JMLAH 14 = (9+13)	
		RUPIAH MURSI	RUPIAH MURSI PENDAMPING	PIJAMAN	HEBAH	Total	RUPIAH MURSI	RUPIAH MURSI PENDAMPING	PIJAMAN	HEBAH	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (9+13)
1	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT	-	7.403.800	31.730.624	648.980	39.784.104	-	-	-	-	-	-	39.784.104
		-	7.403.800	31.730.624	648.980	39.784.104	-	-	-	-	-	-	39.784.104
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	-	720.890	2.505.860	-	3.226.750	-	-	-	-	-	-	3.226.750
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	-	657.865	6.301.800	-	6.959.665	-	-	-	-	-	-	6.959.665
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	-	319.240	319.240	-	-	-	-	-	-	319.240
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	330.740	330.740	-	-	-	-	-	-	330.740
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	-	499.870	3.686.350	-	4.186.220	-	-	-	-	-	-	4.186.220
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	-	432.225	1.416.260	-	1.848.485	-	-	-	-	-	-	1.848.485
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	-	130.000	192.864	-	322.864	-	-	-	-	-	-	322.864
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	-	523.850	1.952.780	-	2.476.630	-	-	-	-	-	-	2.476.630
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	-	150.000	311.472	-	461.472	-	-	-	-	-	-	461.472
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	-	150.000	214.368	-	364.368	-	-	-	-	-	-	364.368
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	-	482.796	1.857.080	-	2.339.876	-	-	-	-	-	-	2.339.876
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	-	301.610	1.834.270	-	2.135.880	-	-	-	-	-	-	2.135.880
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	-	694.075	3.137.497	-	3.831.572	-	-	-	-	-	-	3.831.572
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	-	290.720	838.760	-	1.129.480	-	-	-	-	-	-	1.129.480
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	246.990	551.400	-	798.390	-	-	-	-	-	-	798.390
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	478.410	3.136.940	-	3.615.350	-	-	-	-	-	-	3.615.350
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	-	110.000	246.058	-	356.058	-	-	-	-	-	-	356.058
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	-	231.425	560.620	-	792.045	-	-	-	-	-	-	792.045
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	-	188.725	435.620	-	624.345	-	-	-	-	-	-	624.345
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	-	51.555	112.500	-	174.055	-	-	-	-	-	-	174.055
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	-	249.460	533.830	-	783.290	-	-	-	-	-	-	783.290
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	-	203.310	247.570	-	450.880	-	-	-	-	-	-	450.880
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	-	600.005	1.656.525	-	2.256.530	-	-	-	-	-	-	2.256.530

Kat: *) Diluar Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Program Lingkungan Sehat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TINGKAT PROVINSI *)
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
TAHUN ANGGARAN 2008

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					JUMLAH	
		RUPIAH BUNDE	RUPIAH BUNDE PENDAMPING	PELJAMAN	HEBAH	Total	RUPIAH BUNDE	RUPIAH BUNDE PENDAMPING	PELJAMAN	HEBAH	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (3+13)
II	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	15.084.305	-	-	-	-	15.084.305	-	-	-	-	-	15.084.305
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	294.305	-	-	-	-	294.305	-	-	-	-	-	294.305
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	600.000
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	600.000
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	600.000
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	350.000	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	350.000
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	550.000	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-	-	550.000
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	550.000	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-	-	550.000
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	550.000	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-	-	550.000
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	550.000	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-	-	550.000
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	600.000
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	600.000
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	550.000	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-	-	550.000
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TINGKAT PROVINSI *)
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
TAHUN ANGGARAN 2009

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					Jumlah	
		RUPIAH MURSI	RUPIAH MURSI PENDAMPING	PERUMAHAN	HEBAH	Total	RUPIAH MURSI	RUPIAH MURSI PENDAMPING	PERUMAHAN	HEBAH	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (8+13)
	III PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000						2.000.000
		2.000.000	-	-	-	-	2.000.000						2.000.000
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-						-
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	56.500	-	-	-	-	56.500						56.500
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	59.500	-	-	-	-	59.500						59.500
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	63.500	-	-	-	-	63.500						63.500
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	64.000	-	-	-	-	64.000						64.000
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	67.000	-	-	-	-	67.000						67.000
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	68.000	-	-	-	-	68.000						68.000
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	58.000	-	-	-	-	58.000						58.000
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	55.500	-	-	-	-	55.500						55.500
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	71.000	-	-	-	-	71.000						71.000
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	52.500	-	-	-	-	52.500						52.500
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	49.000	-	-	-	-	49.000						49.000
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	54.000	-	-	-	-	54.000						54.000
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	54.500	-	-	-	-	54.500						54.500
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	98.000	-	-	-	-	98.000						98.000
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	60.000	-	-	-	-	60.000						60.000
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	69.000	-	-	-	-	69.000						69.000
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	61.500	-	-	-	-	61.500						61.500
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	67.500	-	-	-	-	67.500						67.500
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	61.000	-	-	-	-	61.000						61.000
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	70.000	-	-	-	-	70.000						70.000
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	68.000	-	-	-	-	68.000						68.000
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	57.000	-	-	-	-	57.000						57.000
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	64.500	-	-	-	-	64.500						64.500
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	85.500	-	-	-	-	85.500						85.500
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	53.500	-	-	-	-	53.500						53.500
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	71.500	-	-	-	-	71.500						71.500
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	48.000	-	-	-	-	48.000						48.000
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	61.000	-	-	-	-	61.000						61.000
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	67.500	-	-	-	-	67.500						67.500
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	53.500	-	-	-	-	53.500						53.500
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	75.000	-	-	-	-	75.000						75.000
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	61.000	-	-	-	-	61.000						61.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TINGKAT PROVINSI *)
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
TAHUN ANGGARAN 2009

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/ATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					JUMLAH	
		RUPIAH MURNI	RUPIAH MURNI PENDAMPING	PEJAMAH	HEBAH	Total	RUPIAH MURNI	RUPIAH MURNI PENDAMPING	PEJAMAH	HEBAH	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13+12
IV	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	86.038.216	-	-	-	-	86.038.216	-	-	-	-	-	86.038.216
		86.038.216	-	-	-	-	86.038.216	-	-	-	-	-	86.038.216
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	1.302.830	-	-	-	-	1.302.830	-	-	-	-	-	1.302.830
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	4.893.800	-	-	-	-	4.893.800	-	-	-	-	-	4.893.800
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	3.921.325	-	-	-	-	3.921.325	-	-	-	-	-	3.921.325
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.335.760	-	-	-	-	1.335.760	-	-	-	-	-	1.335.760
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	1.816.410	-	-	-	-	1.816.410	-	-	-	-	-	1.816.410
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	2.683.450	-	-	-	-	2.683.450	-	-	-	-	-	2.683.450
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	5.242.890	-	-	-	-	5.242.890	-	-	-	-	-	5.242.890
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	1.632.695	-	-	-	-	1.632.695	-	-	-	-	-	1.632.695
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	742.480	-	-	-	-	742.480	-	-	-	-	-	742.480
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	1.925.155	-	-	-	-	1.925.155	-	-	-	-	-	1.925.155
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	2.981.380	-	-	-	-	2.981.380	-	-	-	-	-	2.981.380
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	3.822.395	-	-	-	-	3.822.395	-	-	-	-	-	3.822.395
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	2.606.365	-	-	-	-	2.606.365	-	-	-	-	-	2.606.365
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	943.025	-	-	-	-	943.025	-	-	-	-	-	943.025
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	723.840	-	-	-	-	723.840	-	-	-	-	-	723.840
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	1.069.405	-	-	-	-	1.069.405	-	-	-	-	-	1.069.405
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	2.848.580	-	-	-	-	2.848.580	-	-	-	-	-	2.848.580
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	2.089.550	-	-	-	-	2.089.550	-	-	-	-	-	2.089.550
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	3.228.180	-	-	-	-	3.228.180	-	-	-	-	-	3.228.180
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	2.148.280	-	-	-	-	2.148.280	-	-	-	-	-	2.148.280
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	1.811.530	-	-	-	-	1.811.530	-	-	-	-	-	1.811.530
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	965.140	-	-	-	-	965.140	-	-	-	-	-	965.140
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.985.830	-	-	-	-	1.985.830	-	-	-	-	-	1.985.830
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.116.565	-	-	-	-	1.116.565	-	-	-	-	-	1.116.565
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	1.836.640	-	-	-	-	1.836.640	-	-	-	-	-	1.836.640
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	1.965.060	-	-	-	-	1.965.060	-	-	-	-	-	1.965.060
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	2.487.830	-	-	-	-	2.487.830	-	-	-	-	-	2.487.830
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	740.860	-	-	-	-	740.860	-	-	-	-	-	740.860
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	713.250	-	-	-	-	713.250	-	-	-	-	-	713.250
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	1.348.556	-	-	-	-	1.348.556	-	-	-	-	-	1.348.556
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	1.113.710	-	-	-	-	1.113.710	-	-	-	-	-	1.113.710
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	657.220	-	-	-	-	657.220	-	-	-	-	-	657.220
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	1.248.280	-	-	-	-	1.248.280	-	-	-	-	-	1.248.280



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TINGKAT PROVINSI *)
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
TAHUN ANGGARAN 2009

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					JUMLAH	
		RUPIAH MURAH	RUPIAH MURAH PENDAMPING	PELUMPAH	HEBAH	Total	RUPIAH MURAH	RUPIAH MURAH PENDAMPING	PELUMPAH	HEBAH	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (3+13)
VI	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT	10.025.200	-	-	-	10.025.200	35.435.000	-	-	-	35.435.000	45.460.200	
		10.025.200	-	-	-	10.025.200	35.435.000	-	-	-	35.435.000	45.480.200	
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	425.200	-	-	-	425.200	-	-	-	-	-	425.200	
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	300.000	-	-	-	300.000	9.785.000	-	-	-	9.785.000	10.085.000	
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	300.000	-	-	-	300.000	9.750.000	-	-	-	9.750.000	10.050.000	
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	300.000	-	-	-	300.000	14.900.000	-	-	-	14.900.000	15.200.000	
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	300.000	-	-	-	300.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.300.000	
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TINGKAT PROVINSI *)
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
TAHUN ANGGARAN 2009

(Dalam Ribu Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					Jumlah	
		RUPIAH MURSI	RUPIAH MURSI PENDAMPING	PNJAMAN	HEBAH	Total	RUPIAH MURSI	RUPIAH MURSI PENDAMPING	PNJAMAN	HEBAH	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (3+13)
VII	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	44.842.947	48.608.080	97.216.895	-	-	183.595.892	-	-	-	-	-	183.595.892
		40.842.947	48.608.080	97.216.895	-	-	183.595.892	-	-	-	-	-	183.595.892
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	730.382	-	-	-	-	730.382	-	-	-	-	-	730.382
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	2.624.899	-	-	-	-	2.624.899	-	-	-	-	-	2.624.899
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	2.765.944	-	-	-	-	2.765.944	-	-	-	-	-	2.765.944
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	610.483	-	-	-	-	610.483	-	-	-	-	-	610.483
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2.930.725	-	-	-	-	2.930.725	-	-	-	-	-	2.930.725
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1.179.553	-	-	-	-	1.179.553	-	-	-	-	-	1.179.553
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	1.402.000	7.700.000	20.024.690	-	-	29.126.690	-	-	-	-	-	29.126.690
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	1.467.857	-	-	-	-	1.467.857	-	-	-	-	-	1.467.857
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	956.573	-	-	-	-	956.573	-	-	-	-	-	956.573
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	1.045.967	-	-	-	-	1.045.967	-	-	-	-	-	1.045.967
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	1.057.782	8.306.280	26.835.190	-	-	36.199.222	-	-	-	-	-	36.199.222
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	1.356.345	-	-	-	-	1.356.345	-	-	-	-	-	1.356.345
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	918.388	7.100.000	13.786.340	-	-	21.806.728	-	-	-	-	-	21.806.728
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	1.052.317	-	-	-	-	1.052.317	-	-	-	-	-	1.052.317
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	1.121.952	-	-	-	-	1.121.952	-	-	-	-	-	1.121.952
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	1.224.005	-	-	-	-	1.224.005	-	-	-	-	-	1,224,005
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	932.653	-	-	-	-	932.653	-	-	-	-	-	932.653
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	1.008.304	-	-	-	-	1,008,304	-	-	-	-	-	1,008,304
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1,044,866	7,199,800	12,057,540	-	-	20,302,306	-	-	-	-	-	20,302,306
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	932.225	-	-	-	-	932.225	-	-	-	-	-	932.225
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	1,611,130	-	-	-	-	1,611,130	-	-	-	-	-	1,611,130
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	1,001,972	-	-	-	-	1,001,972	-	-	-	-	-	1,001,972
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1,000,888	7,300,000	9,346,135	-	-	17,647,023	-	-	-	-	-	17,647,023
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,040,376	7,900,000	15,166,000	-	-	24,105,376	-	-	-	-	-	24,105,376
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	2,108,015	-	-	-	-	2,108,015	-	-	-	-	-	2,108,015
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	993.565	-	-	-	-	993.565	-	-	-	-	-	993.565
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	1,213,717	-	-	-	-	1,213,717	-	-	-	-	-	1,213,717
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	468.360	-	-	-	-	468.360	-	-	-	-	-	468.360
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	711.445	-	-	-	-	711.445	-	-	-	-	-	711.445
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	923.252	-	-	-	-	923.252	-	-	-	-	-	923.252
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	1,114,977	-	-	-	-	1,114,977	-	-	-	-	-	1,114,977
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	1,482,567	-	-	-	-	1,482,567	-	-	-	-	-	1,482,567
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	809.163	-	-	-	-	809.163	-	-	-	-	-	809.163



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TINGKAT PROVINSI *)
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
TAHUN ANGGARAN 2008

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					Jumlah	
		RUPIAH MURNI	RUPIAH MURNI PENDAMPING	PIJAMAN	HIRAH	Total	RUPIAH MURNI	RUPIAH MURNI PENDAMPING	PIJAMAN	HIRAH	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (8+13)
IX	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	126.748.248	-	-	-	126.748.248	130.000.000	-	-	-	-	130.000.000	256.748.248
		126.748.248	-	-	-	126.748.248	130.000.000	-	-	-	-	130.000.000	256.748.248
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	2.274.050	-	-	-	2.274.050	-	-	-	-	-	-	2.274.050
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	6.266.060	-	-	-	6.266.060	-	-	-	-	-	-	6.266.060
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	7.486.760	-	-	-	7.486.760	-	-	-	-	-	-	7.486.760
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	2.065.390	-	-	-	2.065.390	-	-	-	-	-	-	2.065.390
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	7.864.030	-	-	-	7.864.030	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	32.864.030
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	5.262.940	-	-	-	5.262.940	-	-	-	-	-	-	5.262.940
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	5.780.340	-	-	-	5.780.340	12.500.000	-	-	-	-	12.500.000	18.280.340
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	4.445.180	-	-	-	4.445.180	-	-	-	-	-	-	4.445.180
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	2.904.380	-	-	-	2.904.380	-	-	-	-	-	-	2.904.380
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	2.818.980	-	-	-	2.818.980	-	-	-	-	-	-	2.818.980
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	3.574.908	-	-	-	3.574.908	22.500.000	-	-	-	-	22.500.000	26.074.908
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	3.166.130	-	-	-	3.166.130	-	-	-	-	-	-	3.166.130
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	3.432.040	-	-	-	3.432.040	-	-	-	-	-	-	3.432.040
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	4.126.915	-	-	-	4.126.915	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	24.126.915
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	4.151.100	-	-	-	4.151.100	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	24.151.100
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	3.805.350	-	-	-	3.805.350	-	-	-	-	-	-	3.805.350
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	3.847.180	-	-	-	3.847.180	-	-	-	-	-	-	3.847.180
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	3.235.170	-	-	-	3.235.170	-	-	-	-	-	-	3.235.170
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	5.268.256	-	-	-	5.268.256	-	-	-	-	-	-	5.268.256
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	3.195.764	-	-	-	3.195.764	-	-	-	-	-	-	3.195.764
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	3.178.766	-	-	-	3.178.766	-	-	-	-	-	-	3.178.766
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	2.712.046	-	-	-	2.712.046	-	-	-	-	-	-	2.712.046
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.778.620	-	-	-	2.778.620	-	-	-	-	-	-	2.778.620
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.216.750	-	-	-	5.216.750	-	-	-	-	-	-	5.216.750
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	6.805.686	-	-	-	6.805.686	-	-	-	-	-	-	6.805.686
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	2.851.920	-	-	-	2.851.920	12.500.000	-	-	-	-	12.500.000	15.351.920
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	3.247.440	-	-	-	3.247.440	-	-	-	-	-	-	3.247.440
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	2.615.790	-	-	-	2.615.790	-	-	-	-	-	-	2.615.790
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	2.403.478	-	-	-	2.403.478	12.500.000	-	-	-	-	12.500.000	14.903.478
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	2.608.700	-	-	-	2.608.700	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	8.608.700
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	2.360.180	-	-	-	2.360.180	-	-	-	-	-	-	2.360.180
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	2.819.520	-	-	-	2.819.520	-	-	-	-	-	-	2.819.520
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	2.131.230	-	-	-	2.131.230	-	-	-	-	-	-	2.131.230



MENTERI KESEHATAN

[Signature]
Dr. BHI Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TINGKAT PROVINSI *)
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
TAHUN ANGGARAN 2008

(Dalam Ribu Rupiah)

No.	PROGRAM/ATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					Jumlah
		RUPIAH MILYAR	RUPIAH MILYAR PENDAMPING	PERJANJIAN	REBAH	Total	RUPIAH MILYAR	RUPIAH MILYAR PENDAMPING	PERJANJIAN	REBAH	Total	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14 = 8+13
IX	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	126.748.248	-	-	-	126.748.248	130.000.000	-	-	-	130.000.000	256.748.248
		126.748.248	-	-	-	126.748.248	130.000.000	-	-	-	130.000.000	256.748.248
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	2.274.050	-	-	-	2.274.050	-	-	-	-	-	2.274.050
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	6.266.080	-	-	-	6.266.080	-	-	-	-	-	6.266.080
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	7.496.780	-	-	-	7.496.780	-	-	-	-	-	7.496.780
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	2.085.390	-	-	-	2.085.390	-	-	-	-	-	2.085.390
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	7.864.030	-	-	-	7.864.030	25.000.000	-	-	-	25.000.000	32.864.030
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	5.262.940	-	-	-	5.262.940	-	-	-	-	-	5.262.940
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	5.780.340	-	-	-	5.780.340	12.500.000	-	-	-	12.500.000	18.280.340
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	4.445.180	-	-	-	4.445.180	-	-	-	-	-	4.445.180
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	2.904.380	-	-	-	2.904.380	-	-	-	-	-	2.904.380
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	2.818.980	-	-	-	2.818.980	-	-	-	-	-	2.818.980
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	3.574.808	-	-	-	3.574.808	22.500.000	-	-	-	22.500.000	26.074.808
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	3.168.130	-	-	-	3.168.130	-	-	-	-	-	3.168.130
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	3.432.040	-	-	-	3.432.040	-	-	-	-	-	3.432.040
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	4.126.915	-	-	-	4.126.915	20.000.000	-	-	-	20.000.000	24.126.915
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	4.151.100	-	-	-	4.151.100	20.000.000	-	-	-	20.000.000	24.151.100
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	3.805.350	-	-	-	3.805.350	-	-	-	-	-	3.805.350
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	3.847.180	-	-	-	3.847.180	-	-	-	-	-	3.847.180
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	3.235.170	-	-	-	3.235.170	-	-	-	-	-	3.235.170
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	5.288.256	-	-	-	5.288.256	-	-	-	-	-	5.288.256
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	3.195.784	-	-	-	3.195.784	-	-	-	-	-	3.195.784
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	3.176.766	-	-	-	3.176.766	-	-	-	-	-	3.176.766
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	2.712.046	-	-	-	2.712.046	-	-	-	-	-	2.712.046
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.778.820	-	-	-	2.778.820	-	-	-	-	-	2.778.820
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.216.750	-	-	-	5.216.750	-	-	-	-	-	5.216.750
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	6.805.685	-	-	-	6.805.685	-	-	-	-	-	6.805.685
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	2.851.920	-	-	-	2.851.920	12.500.000	-	-	-	12.500.000	15.351.920
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	3.247.440	-	-	-	3.247.440	-	-	-	-	-	3.247.440
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	2.615.790	-	-	-	2.615.790	-	-	-	-	-	2.615.790
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	2.403.478	-	-	-	2.403.478	12.500.000	-	-	-	12.500.000	14.903.478
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	2.608.700	-	-	-	2.608.700	5.000.000	-	-	-	5.000.000	7.608.700
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	2.360.180	-	-	-	2.360.180	-	-	-	-	-	2.360.180
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	2.819.520	-	-	-	2.819.520	-	-	-	-	-	2.819.520
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	2.131.230	-	-	-	2.131.230	-	-	-	-	-	2.131.230

MENTERI KESEHATAN
[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II B

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 366/MENKES/SK/V/2009
TANGGAL : 13 MEI 2009

ALOKASI DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I
TAHUN ANGGARAN 2009

(dalam ribuan rupiah)

NO.	SATUAN KERJA	DEKON					TUGAS PEMBANTUAN					TOTAL
		RM	RMP	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH	RM	RMP	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)	
	DINKES KAB/KOTA	-	-	-	-	-	16,750,000	38,528,000	20,137,640	73,415,640	73,415,640	
1	Dinkes Kab. Pidie	0	0	0	0	0	0	0	3,221,500	3,221,500	3,221,500	
2	Dinkes Kab. Aceh Utara	0	0	0	0	0	0	0	2,726,710	2,726,710	2,726,710	
3	Dinkes Kab. Bireun	0	0	0	0	0	0	0	2,985,150	2,985,150	2,985,150	
4	Dinkes Kab. Aceh Jaya	0	0	0	0	0	0	0	3,241,200	3,241,200	3,241,200	
5	Dinkes Kab. Nagan Raya	0	0	0	0	0	5,500	0	4,231,950	4,237,450	4,237,450	
6	Dinkes Kab. Nias	0	0	0	0	0	5,000	0	1,991,190	1,996,190	1,996,190	
7	Dinkes Kab. Nias Selatan	0	0	0	0	0	4,500	0	1,739,940	1,744,440	1,744,440	
8	Dinkes Kab. Humbang Hasundutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Dinkes Kab. Tanah Karo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Dinkes Kab. Batang Hari	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
11	Dinkes Kab. Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
12	Dinkes Kab. Bungo	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
13	Dinkes Kab. Sarolangun	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
14	Dinkes Kab. Muaro Jambi	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
15	Dinkes Kab. Sembes	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
16	Dinkes Kab. Sanggau	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
17	Dinkes Kab. Sintang	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
18	Dinkes Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
19	Dinkes Kab. Kapang	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
20	Dinkes Kab. Landak	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
21	Dinkes Kab. Kapuas	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
22	Dinkes Kab. Barito Selatan	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
23	Dinkes Kab. Kolowaringin Timur	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
24	Dinkes Kab. Kutai	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
25	Dinkes Kab. Pulang Pisau	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
26	Dinkes Kab. Barito Timur	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
27	Dinkes Kab. Bengkalis Utara	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
28	Dinkes Kab. Bengkalis Selatan	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	
29	Dinkes Kab. Rejang Lebong	0	0	0	0	0	836,600	1,826,400	0	2,663,000	2,663,000	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I
TAHUN ANGGARAN 2009

(dalam ribuan rupiah)

NO.	SATUAN KERJA	DEKON					TUGAS PEMBANTUAN					TOTAL	
		RM	RMP	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH	RM	RMP	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)		
	DINKES KAB/KOTA	-	-	-	-	-	2,950,000	-	-	-	-	2,950,000	2,950,000
1	Dinkes Kab. Pidie	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
2	Dinkes Kab. Aceh Utara	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
3	Dinkes Kab. Bireun	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
4	Dinkes Kab. Aceh Jaya	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
5	Dinkes Kab. Nagan Raya	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
6	Dinkes Kab. Nias	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
7	Dinkes Kab. Nias Selatan	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
8	Dinkes Kab. Humbang Hasundutan	0	0	0	0	-	2,950,000	0	0	0	2,950,000	2,950,000	2,950,000
9	Dinkes Kab. Tanah Karo	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
10	Dinkes Kab. Betang Hari	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
11	Dinkes Kab. Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
12	Dinkes Kab. Bungo	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
13	Dinkes Kab. Serolengun	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
14	Dinkes Kab. Muaro Jambi	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
15	Dinkes Kab. Sambas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
16	Dinkes Kab. Sanggau	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
17	Dinkes Kab. Sintang	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
18	Dinkes Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
19	Dinkes Kab. Kalangay	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
20	Dinkes Kab. Landak	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
21	Dinkes Kab. Kapuas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
22	Dinkes Kab. Barito Selatan	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
23	Dinkes Kab. Kotawaringin Timur	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
24	Dinkes Kab. Kallangay	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
25	Dinkes Kab. Pulang Pisau	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
26	Dinkes Kab. Barito Timur	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
27	Dinkes Kab. Bengkulu Utara	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
28	Dinkes Kab. Bengkulu Selatan	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
29	Dinkes Kab. Rejang Lebong	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I
TAHUN ANGGARAN 2009

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA PROVINSI / KABUPATEN/KOTA		NAMA RUMAH SAKIT		RUPIAH MURNI
1	3		4		5
JAWA BARAT					
1	1	Cianjur	1	RSU Cimacan	5,000,000,000
2	2	Cirebon	2	RSU Waied	3,000,000,000
3			3	RSUD Arjawinangun Cirebon	5,000,000,000
4	3	Kuningan	4	RSU Kuningan	9,000,000,000
5	4	Majalengka	5	RSU Majalengka	5,000,000,000
6	5	Karawang	6	RSU Karawang	8,856,650,000
7	6	Purwakarta	7	RSU Banyu Asih Purwakarta	4,500,000,000
8	7	Banjar	8	RSU Banjar	3,000,000,000
9	8	Garut	9	RSU Dr. Slamet Garut	3,000,000,000
10	9	Ciamis	10	RSUD Ciamis	3,000,000,000
11	10	Tasikmalaya	11	RSU Kab Tasikmalaya	1,000,000,000
12	11	Depok	12	RSU Kota Depok/Baru	5,000,000,000
13	12	Bekasi	13	RSU Kota Bekasi	5,000,000,000
14	13	Cimahi	14	RSU Cibabat Cimahi	1,500,000,000
JAWA TENGAH					
15	14	Banyumas	1	RSU. Prof. Dr. Mangono Soekardjo	5,000,000,000
16	15	Purbalingga	2	RSU Purbalingga	5,000,000,000
17	16	Cilacap	3	RSU Citacap	4,000,000,000
18			4	RSU Majenang	3,000,000,000
19	17	Semarang	5	RSU Ungaran	5,000,000,000
20	18	Kendal	6	RSU Dr. H.Suwondo Kendal	4,000,000,000
21	19	Jepara	7	RS Kusta Kelet Donorejo	4,000,000,000
22	20	Pemalang	8	RSUD M. Anshari Pemalang	5,000,000,000
23	21	Semarang	9	RSUD Tuwu Rejo	2,000,000,000
24	22	Salatiga	10	RSU Salatiga	3,000,000,000
25	23	Pekalongan	11	RSU Bendan Pekalongan	5,000,000,000
26	24	Tegal	12	RSUD Kardinah Tegal	4,000,000,000
D.I. YOGYAKARTA					
27	25	Slleman	1	RSU Sleman	5,000,000,000
28	26	Kulonprogo	2	RSU Wates	4,950,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA PROVINSI / KABUPATEN/KOTA		NAMA RUMAH SAKIT		RUPZAH MURNI
1	3		4		5
JAWA TIMUR					
29	27	Gresik	1	RSU Gresik	3,000,000,000
30	28	Tuban	2	RSU Dr. Koesma Tuban	5,000,000,000
31	29	Madiun	3	RS Caruban Madiun Kab. Madiun(Panti Waluyo)	3,000,000,000
32	30	Lumajang	4	RSU Dr Haryoto Lumajang	5,000,000,000
33	31	Magetan	5	RSU Magetan/RSU Dr. Saydiman	5,000,000,000
34	32	Pacitan	6	RSUD Kab. Pacitan	5,000,000,000
35	33	Nganjuk	7	RSU Kertosono	5,000,000,000
36	34	Malang	8	RSU Kepanjen	7,500,000,000
37	35	Bondowoso	9	RSU Dr. H. Koesnadi	5,000,000,000
38	36	Jember	10	RSUD Soebandi	6,000,000,000
39			11	RSUD Balung	6,000,000,000
40	37	Pamekasan	12	RSU Pamekasan	4,000,000,000
41	38	Probolinggo	13	RS Waluyo Jati Kraksaan	5,000,000,000
42			14	RSUD Tongas	4,000,000,000
43	39	Surabaya	15	RS Haji Surabaya	6,000,000,000
44			16	RSU Dr. Suwandi	6,000,000,000
45			17	RS Jawa Menur	5,000,000,000
46	40	Mojokerto	18	RSU Dr. WS. Husodo Mojokerto	5,000,000,000
47	41	Pasuruan	19	RSU Dr. R. Soedarsono Pasuruan	5,000,000,000
NAD					
48	42	Aceh Timur	1	RSU Idi Rayek	4,000,000,000
49	43	Langsa	2	RSUD Langsa	4,000,000,000
50	44	Bener Meriah	3	RSUD Bener Meriah	5,000,000,000
51	45	Aceh Tengah	4	RSUD Datu Beru Takengon	4,000,000,000
52	46	Aceh Besar	5	RSU Jantho	5,000,000,000
53	47	Banda Aceh	6	RS Jiwa Banda Aceh	4,000,000,000
54			7	RSU Kota Sabang	4,000,000,000
SUMATERA UTARA					
55	48	Tapanuli Utara	1	RSUD Swadana Tarutung	4,950,000,000
56	49	Dairi	2	RSU Sidikalang	7,000,000,000
57	50	Tapanuli Selatan	3	RS Sipirok	6,000,000,000
58	51	Padang Lawas	4	RSU Sibuhuan	6,000,000,000
59	52	Padang Lawas Utara	5	RS Gunung Tua	5,000,000,000
60	53	Pak-Pak Barat	6	RSU Salak	2,000,000,000
61	54	Karo	7	RSU Kabanjahe	5,000,000,000
62	55	Humbang Hasudutan	8	RSUD Dolok Sanggul	5,000,000,000
63	56	Sibolga	9	RSU Dr. FL Tobing Sibolga	3,000,000,000
64	57	Padang Sidempuan	10	RSU Padang Sidempuan (Sumut)	4,950,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA PROVINSI / KABUPATEN/KOTA		NAMA RUMAH SAKIT		RUPIAH MURNI
1	3		4		5
SUMATERA BARAT					
65	58	Pesisir Selatan	1	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	5,000,000,000
66	59	Bukittinggi	2	RSU Dr. A. Muchtar Bukittinggi	4,000,000,000
RIAU					
67	60	Kampar	1	RSU Bangkinang	5,000,000,000
68	61	Indragiri Hilir	2	RSU Purihusada Tembilahan	5,000,000,000
69	62	Dumai	3	RSU Dumai	5,000,000,000
JAMBI					
70	63	Tanjung Jabung Barat	1	RSUD KH.Daud Arif Kuala Tungkal	5,000,000,000
71	64	Bungo	2	RSUD Muara Bungo	5,000,000,000
72	65	Muara Jambi	3	RSU Muaro Jambi	5,000,000,000
73	66	Tg Jabung Timur	4	RS Nurdin Hamzah	5,000,000,000
74	67	Batang Hari	5	RSU Hamba Batang Hari (Muara Bullan)	5,000,000,000
75	68	Merangin	6	RSUD Kol Abdul Jani Bangko	10,000,000,000
76	69	Tebo	7	RSUD Sultan Thaha Saifuddin	5,000,000,000
SUMATERA SELATAN					
77	70	Muara Enim	1	RSU H.M. Rabain , Muara Enim	15,000,000,000
78			2	RSU Talang Ubi	10,000,000,000
79	71	Lahat	3	RSU Lahat	8,000,000,000
80	72	Oku Selatan	4	RS Muara Dua	4,000,000,000
81	73	Banyuasin	5	RSU Kab. Banyuasin	10,000,000,000
82	74	Pagar Alam	6	RSUD Basemah	5,000,000,000
83	75	Prabumulih	7	RSU Prabumulih	5,000,000,000
LAMPUNG					
84	76	Lampung Utara	1	RSU Mayjen H.M. Ryacudu Kotabumi	5,000,000,000
85	77	Lampung Barat	2	RSUD Liwa	5,000,000,000
86	78	Lampung Tengah	3	RSUD Lampung Tengah (RS Demang S. Raya)	5,000,000,000
87	79	Way Kanan	4	RSUD Way Kanan	5,000,000,000
KALIMANTAN BARAT					
88	80	Sambas	1	RSU Sambas	6,000,000,000
89			2	RSU Pemangkat	3,000,000,000
90	81	Ketapang	3	RSU Dr. Agusdjam Ketapang	2,750,000,000
91	82	Sanggau	4	RSU Sanggau	750,000,000
92	83	Sintang	5	RSU Sintang	5,500,000,000
93	84	Pontianak	6	RS Jiwa Singkawang	500,000,000
94			7	RSUD Mempawah	1,700,000,000
95	85	Singkawang	8	RS Dr. Abdul Aziz Singkawang	6,000,000,000
96	86	Melawi	9	RS Nanga Pinoh Melawi	5,000,000,000
97	87	Pontianak	10	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	800,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA PROVINSI / KABUPATEN/KOTA		NAMA RUMAH SAKIT		RUPIAH MURNI
1	3		4		5
KALIMANTAN TENGAH					
98	88	Pulang Pisau	1	RSUD Pulang Pisau	2,000,000,000
99	89	Palangkaraya	2	RSUD Dr. Dorris S. Palangkaraya	2,000,000,000
KALIMANTAN SELATAN					
100	90	Tanah Laut	1	RSU H. Boejasin Pelaihari	575,000,000
101	91	Balangan	2	RSU Balangan	650,000,000
102	92	Hulu Sungai Tengah	3	RSU Damanhuri	7,500,000,000
103	93	Kota Baru	4	RSU Kota Baru	550,000,000
104	94	Barito Kuala	5	RSU Marabahan	7,500,000,000
105	95	Tanah Bumbu	6	RSU Tanah Bumbu	525,000,000
106	96	Banjarbaru	7	RSU Banjarbaru	625,000,000
107	97	Banjarmasin	8	RSU Ansari Saleh	1,025,000,000
108			9	RSU Ulin Banjarmasin	2,000,000,000
109			10	RS Jiwa Tamban	550,000,000
110			11	BLK Daerah Prop Kalsel	500,000,000
KALIMANTAN TIMUR					
111	98	Tarakan	1	RSU Tarakan	5,000,000,000
SULAWESI UTARA					
112	99	Sangihe	1	RSUD Liun Kandage Tahuna	842,143,000
113	100	Kep Talaud	2	RSU Talaud	9,300,407,000
114	101	Tondano	3	RSU Dr. Samratulangi	768,025,000
115	102	Minahasa	4	RS Noongan Langowan	717,501,000
116			5	RSUD Rataotok	7,000,000,000
117	103	Minahasa Selatan	6	RSU Amurang	1,019,700,000
118	100	Bolaang Mongondow	7	RSUD Datoe Binangkang	1,020,443,000
119			8	RSUD Lolak(daerah pemekaran)	1,400,000,000
120	101	Minahasa Utara	9	RSUD Lolak(daerah pemekaran)	4,967,658,000
121	103	Bitung	10	RSUD Manembo Nembo Bitung	5,000,000,000
122	104	Manado	11	RSU Prof. Ratumbusyang	800,000,000
123			12	BLK Manado	953,542,000
124			13	Balai Kes. Mata Masyarakat (Dinkes Sulut)	533,248,000
125	105	Bolaang Mongondow Utara	14	RSUD Bolmut (daerah pemekaran)	1,000,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA PROVINSI / KABUPATEN/KOTA		NAMA RUMAH SAKIT		RUPIAH MURNI
1	3		4		5
SULAWESI SELATAN					
126	106	Palopo	1	RS AT Medika	500,000,000
127	107	Luwu	2	RSU Batara Guru	5,000,000,000
128	108	Pinrang	3	RSU Laskarang Pinrang	2,000,000,000
129	109	Sidenreng Rappang	4	RSU Anfin Nu'mang	7,000,000,000
130	110	Wajo	5	RSU Lamaddukelieng Sengkang	7,000,000,000
131	111	Bantaeng	6	RSU Prof Dr. HM Anwar M	4,000,000,000
132	112	Luwu Utara	7	RSU Andi Djemma Masamba	4,950,000,000
133	113	Bone	8	RS Tenriwaru Bone	2,950,000,000
134	114	Pangkajene Kep.	9	RSU Pangkep	5,000,000,000
135	115	Gowa	10	RS Syeh Yusuf Gowa/RSU Sungguminasa	4,000,000,000
136	116	Makassar	11	RS Haji Makassar	250,000,000
137			12	RSU Daya Makassar	2,000,000,000
138			13	RS Hikmah Makassar	500,000,000
139			14	RS Rakyat Propinsi Sulawesi Selatan	10,000,000,000
SULAWESI TENGGARA					
140	117	Kolaka	1	RSU Kolaka	2,500,000,000
141	118	Buton	2	RSU Buton/Pasar Wajo	5,000,000,000
142	119	Konawe	3	RSU Unaaha	2,000,000,000
143	120	Bombana	4	RSUD Bombana (Pengembangan)	2,500,000,000
144	121	Makotabi	5	RSUD Wakotabi	2,000,000,000
145	122	Muna	6	RSU Raha	5,000,000,000
146	123	Kendari	7	RS Abunawas	3,000,000,000
147			8	RSU Kendari	5,000,000,000
MALUKU					
148	124	Maluku Tenggara	1	RSU Tual	5,000,000,000
149	125	Maluku Tengah	2	RSU Tulehu	2,500,000,000
150	126	Pulau Buru	3	RSU Namlea	2,500,000,000
151	127	Seram Bagian Timur	4	RSU Bula	7,000,000,000
152	128	Maluku Tenggara Barat	5	RSU Saumlaki (Rujukan MTB)	5,000,000,000
153	129	Aru	6	RSU Dobo	5,000,000,000
BALI					
154	130	Glanyar	1	RSU Sanjwani	5,000,000,000
155	131	Karangasem	2	RSU Karangasem	2,000,000,000
156	132	Klungkung	3	RSUD Klungkung	5,000,000,000
157	133	Jembrana	4	RSUD Negara/ Jembrana	5,000,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA PROVINSI / KABUPATEN/KOTA		NAMA RUMAH SAKIT		RUPIAH MURNI
1	3		4		5
NUSA TENGGARA BARAT					
159	135	Lombok Barat	1	RSU Lombok Barat (Gerung)	5,000,000,000
160	136	Sumbawa	2	RSU Rujukan Propinsi di Pulau Sumbawa	45,000,000,000
NUSA TENGGARA TIMUR					
161	137	Sumba Barat	1	RSU Waikabubak	5,000,000,000
162	138	Kupang	2	RSUD Naibonat	5,000,000,000
163	139	Sikka	3	RSU TC Hillers Maumere	9,000,000,000
164	140	Flores Timur	4	RSU Larantuka	7,000,000,000
165	141	Manggarai	5	RSU Ruteng	4,950,000,000
166	142	Kupang	6	RSU Sabu	2,000,000,000
PAPUA					
167	143	Merauke	1	RSUD Merauke	7,000,000,000
168		Jayapura	2	RSUD DOK 2 Papua	5,000,000,000
169	144	Asmat	3	RSUD Asmat	7,000,000,000
BENGKULU					
170	145	Muko-muko	1	RSUD Muko-muko	5,000,000,000
171	146	Bengkulu Selatan	2	RSUD Manna	5,000,000,000
172	147	Rejang Lebong	3	RSUD Curup	10,000,000,000
173	148	Bengkulu Utara	4	RSUD Arga Makmur	5,000,000,000
174	149	Kepahyang	5	RSUD Kepahyang	15,000,000,000
	150	Bengkulu		RSUD Dr. m. Yunus Bengkulu	8,000,000,000
175			6	RS Jiwa dan KO Bengkulu	7,000,000,000
176			7	BLK Daerah Prop Bengkulu	6,000,000,000
MALUKU UTARA					
177	151	Kepulauan Sulu	1	RSU Sanana	4,000,000,000
BANTEN					
178	152	Pandeglang	1	RSUD Labuhan	5,000,000,000
179	153	Lebak	2	RSU Dr. Ajudarmo Rangkas Bitung Lebak	4,500,000,000
180			3	RS Malingping	5,000,000,000
181	154	Tangerang	4	RSUD Balaraja	500,000,000
182	155	Cilegon	5	RSUD Cilegon	500,000,000
183	156	Serang	6	RSUD Serang	500,000,000
184			7	RS Rujukan Provinsi (Baru)	10,000,000,000
SULAWESI BARAT					
185	157	Mamuju	1	RSU Mamuju	5,000,000,000
186	158	Mamuju Utara	2	RS Mamuju Utara	7,000,000,000
187	159	Mamasa	3	RSU Mamasa	5,000,000,000
188			4	RSUD Majene	1,000,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA PROVINSI / KABUPATEN/KOTA		NAMA RUMAH SAKIT		RUPIAH MURNI
1	3		4		5
	IRIAN JAYA BARAT				
188	159	Teluk Wondawa	1	RS Teluk Wondawa	7,000,000,000
189	160	Sorong Selatan	2	RSUD Sorong Selatan	5,000,000,000
				JUMLAH	883,629,317,000



MEI 2009
MENTERI KESEHATAN R.I.

Dr. dr. Siti Endang Supari, Sp.JP(K)

7